
**EVALUASI DAMPAK IMPLEMENTASI PNPM-MANDIRI PERDESAAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PEDESAAN DI INDONESIA**

¹⁾Rusman

Jurusan Manajemen, Universitas Bina Bangsa Banten

Email : rusman@binabangsa.ac.id

ABSTRAK

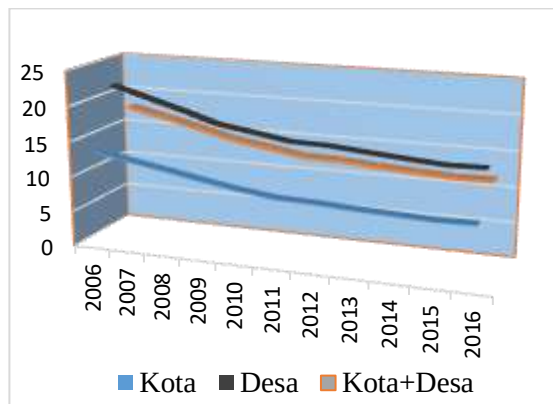
Sebagai negara yang berkomitmen dalam mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia, telah ditegaskan dalam tujuan pembangunan yang merupakan tujuan pembangunan pada poin pertama adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, pemerintah Indonesia terus merancang kebijakan. untuk mengurangi angka kemiskinan. Pada awal kuartal kedua tahun 2007, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS-RI) meluncurkan program yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri-Perdesaan). Program tersebut dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui rangkaian program pemberdayaan, kegiatan dukungan keuangan dan peningkatan kapasitas masyarakat desa di Indonesia. Sejak tahun 2007, implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dimulai, hingga tahun 2013 ketika program berakhir, banyak capaian pembangunan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di pedesaan di Indonesia. Tujuan studi ini adalah fokus untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan. Data yang digunakan adalah data time series yang bersumber dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) gelombang 5 2104. Penelitian ini menggunakan metode estimasi Propensity Score Matching (PSM), untuk memperkirakan dampak perlakuan terhadap kelompok desa penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNPM-Mandiri Perdesaan mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sebesar 7,35 persen. Hasil studi ini memberikan penegasan tentang pentingnya peningkatan peran pemerintah dalam merancang strategi dan program penanggulangan kemiskinan, khususnya dengan desain dan model yang berbasis program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: PNPM-Mandiri Perdesaan, Tingkat Kemiskinan, PSM.

PENDAHULUAN

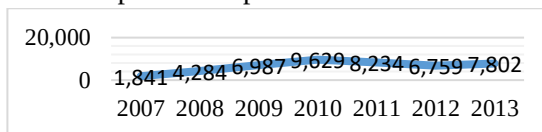
Karakteristik umum yang menjadi ciri khas masyarakat perdesaan adalah adanya keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kemiskinan. Todaro dan Smith (2008, 271) mengemukakan, bahwa kesejahteraan suatu masyarakat merupakan fungsi dari pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan absolut. Bank Dunia secara lebih spesifik menggunakan pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli (*purchasing power parity*), untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antara negara secara lebih akurat. Berdasarkan pada tingkat kesejahteraan tersebut, Bank Dunia (*The World Bank*) membagi dua kelompok negara yakni negara maju (*Developed Countries*) dan negara sedang berkembang (*Developing Countries*). Penelitian yang dilakukan Quadir dan Lele (2004) menyimpulkan, krisis finansial di Asia pada akhir tahun 1990-an telah membawa implikasi bagi berkembangnya kajian terhadap pengembangan demokrasi, dan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan. Siddik (2009, 135) mengungkapkan, bahwa selain untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar pemerintah daerah, tranfer dana pembangunan ke daerah juga

dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia di daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat di pelosok wilayah perdesaan. Faktanya, meskipun secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan, wilayah perdesaan (*rural area*) masih tetap dominan menjadi penyumbang bagi persentase tingkat kemiskinan nasional, jika dibandingkan dengan kemiskinan di kawasan perkotaan (*urban area*) di Indonesia. Perkembangan persentase tingkat kemiskinan antara desa dan kota dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1
Perkembangan persentase penduduk miskin antara desa dan kota Tahun 2006-2016 (BPS & Bappenas RI 2018).

Bukan hanya di Indonesia, tapi juga pada negara-negara sedang berkembang lainnya di berbagai belahan dunia, problem pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan masih tetap menjadi salah satu fokus utama dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji implementasi program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Asia dan Afrika. Penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Chambers (1983), Harrison (1995), Obidewu dan Yahie (1996), Serr (2001) dan Hadi (2010). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat berbagai keberhasilan dan juga kegagalan program-program. Beberapa penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan antara lain karena pendekatan target dan *top-down*, pengabaian nilai-nilai lokal dan bias *outsider*, kurangnya partisipasi masyarakat lokal sebagai subjek dan objek pembangunan, pendekatan yang tidak holistik dan cenderung parsial, serta ilusi investasi asing. Pemerintah meresmikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kota Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2007. PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri dengan dasar hukum yaitu Inpres No. 5/1993 yang meliputi tiga komponen yaitu bantuan modal usaha untuk pengembangan, bantuan pendampingan dan bantuan pembangunan prasarana Pendukung Desa Tertinggal (PDT). Realisasi anggaran PNPM-Mandiri Perdesaan dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini :



Gambar 2
Realisasi Anggaran PNPM-Mandiri Perdesaan Tahun 2007-2013 Rp Milliar (Bappenas RI & TNP2K 2018)

Program ini menyediakan bantuan langsung masyarakat sebesar Rp1 miliar hingga Rp3,5 miliar setiap kecamatan, yang tergantung pada besaran populasi penduduk dan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Untuk menggunakan dana tersebut, masyarakat harus ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian yang dilakukan dalam sistem musyawarah berjenjang, dimulai dari musyawarah kelompok, lalu musyawarah dusun/banjar, kemudian musyawarah desa, musyawarah antar desa dan tahap terakhir yaitu musyawarah tertinggi. Rencana penelitian ini didasarkan pada adanya temuan bahwa, beberapa hasil penelitian terdahulu belum didasarkan pada *self-reporting survey*, sehingga memungkinkan adanya bias pengukuran dalam menilai keberhasilan program. Evaluasi program PNPM-Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh Bappenas RI pada tahun 2013, masih lebih banyak ditekankan pada aspek teknis pelaksanaan dan institusional program. Diskursus tentang teori dan konsep tentang pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan di berbagai negara, sudah memperoleh perhatian yang cukup besar dari akademisi dan peneliti. Menurut Angeles (2004), pemberdayaan masyarakat menjadi satu skema kebijakan populer dalam mengentaskan kemiskinan pasca krisis ekonomi Asia pada tahun 1990-an. Koentjaraningrat (2007, 105) mengungkapkan, bahwa menguatnya isu demokratisasi dan semangat *civil society* menyebabkan masyarakat semakin mendapatkan tempat yang lebih luas, setidaknya dalam mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang merupakan fondasi bagi kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, wacana pemberdayaan masyarakat perlu dikontekstualisasikan ke dalam kebijakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menjadi isu utama dalam program dan orientasi pembangunan nasional dewasa ini. Menurut Munandar (2008), menguatnya model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman kegagalan strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga pengalaman negara-negara maju yang kemudian mendorong terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sebagai sentral (*capital centered development*) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (*people centered development*). Chamber (2011) dan Acuviatra (2016) melihat pemberdayaan sebagai suatu konsep yang juga merepresentasikan sebuah paradigma baru (*a new paradigm*) dalam pembangunan, dikenal dengan istilah *people-centered* yang memiliki ciri khas penguatan kapasitas dan keberlanjutan. Sebuah upaya untuk mengembangkan kekuatan potensial masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu kondisi yang stabil dan berkelanjutan. Menurut Saepudin dan Acuviatra (2016), program pemberdayaan masyarakat merupakan kebijakan strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin perdesaan melalui pengembangan sumber daya manusia, modal dan usaha produktif dan kelembagaan. PNPM-Mandiri Perdesaan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan aktivitas masyarakat yang didanai oleh program (PNPM Support Facility 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Hashemi dan Riley (1996), Afolabi (2008), Oliveira (2009), Voss (2012), Diraka (2013), Akrojah (2013), Khan (2013), Putri dan Prabawati (2014), Alese (2015), Plaagerson dan Ulriksen (2015), dan Sumelung (2015), di berbagai negara tentang program pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang beragam. Beragamnya hasil temuan penelitian tersebut, menunjukkan satu indikasi bahwa, terdapat berbagai kondisi sosio-kultural yang bervariasi antarnegara yang memiliki program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Terdapat program yang secara positif dan signifikan, efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, ada juga yang menunjukkan hasil kurang memuaskan, khususnya jika ditinjau dari tujuan pelaksanaan program.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan *self-reporting survey* sebagaimana yang telah dilakukan oleh *Rand Corporation*. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian survei yang menggunakan data sekunder dan telah tersedia. Populasi merupakan objek penelitian secara keseluruhan. Basis data yang digunakan dalam IFLS5 mengacu pada kode dan wilayah kerja statistik BPS. Oleh karena itu, maka populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 85.190 desa/kelurahan. Sampel dalam penelitian ini adalah 621 desa/kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi dilakukannya survei dan masuk dalam *Indonesia Family Life Survey wave 5 (IFLS5)* tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode *quasi-experiment* dengan alat analisis *Propensity Score Matching (PSM)*. Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *selection biased* pada karakteristik yang tidak dapat diamati (*unobserved*). Sebagaimana telah diketahui, bahwa *missing counterfactual* adalah masalah yang seringkali muncul dalam studi non-eksperimental. Oleh karena itu, metode PSM menggunakan informasi dari desa/kelurahan lain yang tidak menerima program sebagai *control groups*. Menurut Rosenbaum dan Rubin (1983 dalam Sulistyaningrum, 2016), bahwa *Propensity Score Matching* adalah metode yang memungkinkan untuk melakukan pencocokan (*matching*) variabel-variabel dengan menggunakan skor yang seimbang. Blundell, Deradem dan Sianesi (2005, dalam Sulistyaningrum, 2016) mendefinisikan *Propensity Score Matching (PSM)* sebagai suatu kondisi observasi *treatment* dan *non-treatment* dengan nilai *score of propensity* yang sama, memiliki distribusi nilai yang sama. Menurut Caliendo dan Kopeining (2005), Sianesi (2006) (dalam Sulistyaningrum, 2016), model inti dari metode PSM adalah terdiri atas *outcome* dari *treatment groups* dan *outcome* dari *non-participian groups* secara individual. *Outcome* secara individual tersebut, dapat dilihat dari model.

$$Y_r = D_r Y_{1r} + (1 - D_r) Y_{0r} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$T_i = Y_{1i} - Y_{0i} \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\tau ATET = [Y_{1r} - Y_{0r} \mid D_r = 1] \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$\tau ATET = E(\tau \mid D_r = 1) = E[Y_{1r} \mid D_r = 1] - E[Y_{0r} \mid D_r = 1] \quad \dots\dots (4)$$

$$\{E[Y_{1r} \mid D_r = 1] - E[Y_{0r} \mid D_r = 0]\} = \tau ATET \quad \dots\dots\dots (5)$$

Penelitian ini menggunakan metode pencocokan *Nearest Neighbour (NN)* dengan mencocokkan *propensity score* terdekat dari individu kelompok pembanding. Hal ini dapat mengatasi masalah adanya unit partisipan yang dibuang karena ketiadaan unit kontrol pada bloknnya (Gurning 2016). Menurut Sianesi (2006) dan Sulistyaningrum (2016) (dalam Gurning, 2017), terdapat dua asumsi yang harus dipenuhi ketika melakukan pengujian menggunakan metode PSM untuk mendapatkan kelompok kontrol yang sama yaitu CIA dan *common support*. Untuk mengestimasi data dengan menggunakan PSM dapat dilakukan dengan 5 langkah, yaitu 1) mengestimasi *propensity score*, 2) memilih *matching algorithm*, 3) memeriksa *common support*, 4) menilai kualitas pencocokan (*matching*) dan 5) mengestimasi standar error dan analisis sensitifitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 621 desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan yang diteliti sebagai sampel penelitian, mengacu pada jumlah sampel desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan masuk dalam *IFLS5* tahun 2014.

Tabel 1
Ringkasan statistik data penelitian

		Obs .	Mea n	Std. Dev	Min	Max
O ut co m e	Ke mis kina n	308	22,63 1	20,98 5	0,51 0	193,1 75
Int er es t (T re at m en t)	dPN PM _Ru ral	621	0.413	0.493	0	1
C on tr ol s	Pop ulas i	311	1340 4,17	17158 ,52	410	1086 47
	Lua s_W ilay ah	311	1391, 525	4822, 834	0,48	4045 8
	Jara k_D esa	311	17.90 4	22.90 9	0.3	157
	Pen dap atan Des a	311	2.20e +09	3.29e +09	0	1.00e +10
	Jaw a	311	0,578	0,494	0	1

Urban	311	0,672	0,470	0	1
Keters. Listrik	311	95,753	10,256	5	100
Keters. PAM	311	0,309	0,463	0	1
Keters. Toilet	311	0,309	0,463	0	1
Peng. Sampah	311	0,528	0,501	0	1
Sistem Irigasi	311	0,528	0,501	0	1
Penc. Utama	311	0,734	0,443	0	1
Jalan Utama	311	0,064	0,245	0	1
dJampeksal	621	0,719	0,449	0	1
dJamkesmas	621	0,807	0,396	0	1
dJKN	621	0,727	0,447	0	1
dRaskin	621	0,979	0,143	0	1

dBL SM	621	0,694	0,461	0	1
dPK H	621	0,471	0,499	0	1
dKP S	621	0,454	0,499	0	1
dKI S	621	0,107	0,309	0	1
dKI P	621	0,097	0,296	0	1
dK KS	621	0,065	0,246	0	1

Sumber: Output Stata.13 dan IFLS5 2018

Dari Tabel 1 dapat dilihat, bahwa jumlah observasi pada setiap variabel tidak seragam. Namun demikian, untuk variabel utama dPNPM-Rural sebagai *treatment variable* dan *control groups* (dJampersal, dJamKesMas, dJKN, dRaskin, dBSLM, dPKH, dKPS, dKIS, dKIP dan dKKS), menunjukkan jumlah obeservasi yang sama yakni 621 observasi. Data dari variabel-variabel tersebut diperoleh dari buku 1 *IFLS5*. Sementara untuk variabel kontrol seperti jumlah populasi, luas wilayah, jarak desa/kelurahan ke pusat pemerintahan, pendapatan desa, jawa, dan urban diperoleh dari 1A buku 2 *IFLS5* dengan jumlah observasi sebanyak 311. Demikian juga untuk variabel-variabel tentang karakteristik desa yakni ketersediaan listrik, ketersediaan air minum/masak, ketersediaan toilet, pengelolaan sampah, sistem irigasi dan jenis mata pencaharian utama, juga diperoleh dari buku 1A dan buku 2 dengan jumlah observasi yang sama yakni 311 obesrvasi. Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa, variabel yang memiliki jumlah observasi paling sedikit adalah variabel persentase penduduk miskin (kemiskinan) yakni 308 observasi. Jumlah tersebut adalah 49.6% dari total 621 desa/kelurahan yang menjadi objek penelitian.

Tabel 2

Ringkasan data penelitian variabel kontrol utama

N o	Variabe l	Deskripsi Data		Mean	Ket
1	Jumlah Populasi	Tersedik it	410	54.73 3	Jumlah Jiwa
		Terbany ak	108.64 7		
2	Luas Wilayah	Tersemp it	0,48	20.22 9	H.a
		Terluas	40.458		
3	Pendapa tan Desa	Terenda h	2.000.0 00	2.20e +09	Juta (Rp)
		Tertingg i	1.00e+ 10		
	Jarak Desa Ke	Terdeka t	0.3		K.m

4	Kabupaten	Terjauh	157	17.904	
5	Jawa	Jawa	180	dummy	Letak Desa
		Luar Jawa	131		
6	Urban	Perkotaan	209	dummy	Status Desa
		Perdesaan	102		

Sumber: Output Stata.13 dan IFLS5 (diolah), 2018

Dari jumlah total 311 desa/kelurahan yang diteliti, variabel jumlah populasi menunjukkan data yang bervariasi. Terdapat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk terendah yakni hanya 410 jiwa, sementara terdapat juga desa/kelurahan dengan jumlah populasi penduduk tertinggi yaitu sebanyak 108.647 jiwa, dengan nilai *mean* sebesar 13.404 jiwa. Demikian juga dengan variabel luas wilayah.

Terdapat desa/kelurahan dengan luas hanya 0,48 Ha dan desa/kelurahan yang memiliki wilayah terluas yakni 40.458 Ha dengan nilai *mean* seluas 1.391 Ha. Kedua variabel ini dipandang cukup signifikan dalam memengaruhi probabilitas sebuah desa/kelurahan untuk dapat menerima program atau tidak.

Selain variabel jumlah populasi dan luas wilayah, variabel tingkat pendapatan desa dan jarak desa/kelurahan ke pusat pemerintah kabupaten juga memiliki karakteristik yang beragam. Dari data yang diperoleh, terdapat 4 desa/kelurahan yang sama sekali tidak memiliki pendapatan tahunan. Namun, ada kemungkinan data yang diperoleh tidak menunjukkan kondisi *existing* yang sebenarnya, oleh karena responden yang diwawancarai tidak menjawab pertanyaan. Padahal, narasumber untuk menjadi sumber informasi untuk pertanyaan tersebut adalah kepala desa atau aparatur desa/kelurahan lainnya yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Tabel 3

Karakteristik desa/kelurahan berdasarkan kriteria desa tertinggal Ditjen PDT Kemendes RI

No	Variabel	Deskripsi Data		Means	Ket.
1	Ketersediaan Listrik	Terendah	5.0	52,5	% (%)
		Tertinggi	100		
2	Ketersediaan PAM	PAM	96	dummy (1.0)	Sumber Air Minum
		Non PAM	215		
3	Ketersediaan Toilet	Pribadi	285	dummy (1.0)	Jenis Toilet
		Umum	26		
4	Cara Mengelola Sampah	Dibakar	190	dummy (1.0)	Kelola Sampah
		Lainya	121		

5	Sistem Irigasi	Non Teknis	164	<i>dum my (1.0)</i>	Irigasi Pertani an
		Teknis	147		
6	Sumber Mata Pecaharian Utama	Pertania n	228	<i>dum my (1.0)</i>	Lapang an Kerja
		Lainya	83		
7	Jenis Jalan Utama	Non Aspal	20	<i>dum my (1.0)</i>	Jalan Utama Desa
		Aspal	291		

Sumber: Output Stata.13 dan IFLS5 (diolah), 2018

Secara keseluruhan, dari 311 desa/kelurahan yang diteliti pada 13 provinsi, survei dilakukan di 180 desa/kelurahan yang berada di Pulau Jawa. Sementara 131 sisanya, berada di luar Jawa yakni tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Sementara untuk desa/kelurahan yang masuk kategori desa perkotaan (*urban*), terdapat 209 desa/kelurahan di perkotaan dan 102 desa/kelurahan yang terletak dan termasuk kategori wilayah perdesaan.

Tabel 4
Karakteristik responden pada program pengentasan kemiskinan lainnya

No	Variabel	Menerima Program				Ket. (<i>dummy</i>)
		Ya	(%)	Tidak	(%)	
1	dJam PerS al	447	71,9	174	28,1	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
2	dJam Kes Mas	501	80,6	120	19,4	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
3	dJK N	451	72,6	170	27,4	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
4	dRas kin	608	97,9	13	2,1	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
5	dBS LM	431	69,4	190	30,6	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
6	dPK H	292	47,1	329	52,9	Penerima =1 dan Non Penerima = 0

7 .	dKPS	28 2	45, 4	33 9	54, 6	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
8 .	dKIS	66	10, 6	55 5	89, 4	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
9 .	dKIP	60	9,6	56 1	90, 4	Penerima =1 dan Non Penerima = 0
1 0 .	dKKS	40	6,4	58 1	93, 6	Penerima =1 dan Non Penerima = 0

Sumber: Output Stata.13 dan IFLS5 (diolah), 2018

Tabel 5
Logit PNPM-Mandiri Perdesaan

Variabel Dependen: PNPM-Mandiri Perdesaan	Perkiraan Parameter	
	Koefisien	S.E
Jumlah Populasi	4,073*	0,000
Pendapatan Desa	-2,441*	5,372
Jarak_Desa/Kel.	0,005*	0,006
Luas Wilayah	-0,000*	0,000
Jawa	-0,415*	0,324
dAspal	1,518**	0,704
dPAM	-0,455*	0,378
dListrik	0,698***	0,025
dToilet	0,305*	0,524
dSampah	0,100*	0,384
dIrigasi	0,004*	0,278
dPetani	0,704**	0,384
dJampersal	0,330*	0,318
dJamKesMas	-0,137*	0,325
dJKN	-,077*	0,334
dRaskin	1,113*	1.154
dPKH	-0,349*	0,302
dKPS	-1,090***	0,312
dKIS	-0,892*	0,683
dKIP	-0,456*	0,659
dKKS	0,472*	0,606

_const.	-8.155***	2.819
---------	-----------	-------

Sumber: IFLS 5 (Diolah), 2018

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien dari masing-masing variabel sangat beragam. Besaran nilai koefisien tersebut menunjukkan probabilitas sebuah desa/kelurahan dalam menerima Program PNPM-Mandiri Perdesaan. Variabel yang memiliki nilai probabilitas tertinggi adalah jumlah populasi yakni 4,073 diikuti oleh pendapatan desa sebesar -2,441, jarak desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kabupaten sebesar 0,005, letak desa/kelurahan (jawa dan luar jawa) sebesar -0,415, dan kondisi jalan utama yang belum diaspal sebesar 1,518. Variabel jumlah populasi merupakan determinan utama sebuah desa/kelurahan dapat menerima program. Artinya, semakin banyak penduduk sebuah desa/kelurahan, maka semakin besar pula probabilitas desa/kelurahan tersebut akan menerima program. Menarik untuk diteliti lebih dalam jika mencermati koefisien luas wilayah yakni 0,000 yang berarti bahwa, variabel ini tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap probabilitas sebuah desa/kelurahan untuk mendapatkan program atau tidak. Dalam melakukan estimasi dengan menggunakan metode *Propensity Score Matching* (PSM), terlebih dahulu perlu dihilangkan adanya bias-bias yang akan memengaruhi hasil estimasi.

1. Uji standar bias, untuk melihat pengurangan bias setelah *matching*.

Tabel 6

Hasil uji bias terstandar dari NN with replacement matching

Variabel	Sebelum Matching (%)	Setelah Matching (%)
Persentase Penduduk Miskin	-12,8	-35,5
Jumlah Populasi	-3,8	25,2
Pendapatan Desa	-10,5	-1,2
Jarak_Des/Kel.	6,6	-0,6
Luas Wilayah	-16,2	-2,4
Jawa	-25,9	9,5
dAspal	20,8	-4,9
dPAM	-15,4	-15,1
dListrik	24,0	1,1
dToilet	-0,8	-8,3
dSampah	-1,5	16,4
dIrigasi	0,3	-6,9
dPetani	3,2	-12,8
dJampersal	7,4	9,9
dJamKesMas	-8,0	7,8
dJKN	-13,8	8,1
dRaskin	13,0	16,7
dPKH	-26,4	-21,1
dKPS	-48,3	19,3
dKIS	-39,5	-6,3

dKIP	-32,1	-6,3
dKKS	-18,1	12,2
<i>Mean Bias</i>	15,8	11,3

Sumber: IFLS 5 (Diolah 2018)

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari variabel yang ada, setelah dilakukan *matching*, terdapat 15 dari 23 variabel memiliki nilai bias yang lebih kecil. Sementara 8 variabel lainnya memiliki nilai bias yang lebih tinggi. Berkaitan dengan itu, Caliendo dan Copeining (2008) mengungkapkan, belum terdapat standar yang jelas untuk menentukan keberhasilan dalam pengurangan standar bias dalam metode *matching*, sehingga masih sangat terbuka untuk dilakukan pengembangan tentang itu. Nilai rata-rata bias terstandar menunjukkan penurunan dari 15,8 menjadi 11,3. Proses *matching* pada penelitian ini dapat dikatakan berhasil.

Tabel 7
Uji beda rata-rata sebelum dan sesudah *matching* (*t-test*)

Variabel	<i>P-value</i> dari <i>t-test</i>	
	Sebelum <i>Matching</i>	Setelah <i>Matching</i>
Persentase Penduduk Miskin	0,326	0,089
Jumlah Populasi	0,775	0,052
Pendapatan Desa	0,417	0,938
Jarak_Desa/Kel.	0,591	0,966
Luas Wilayah	0,242	0,834
Jawa	0,039	0,544
dAspal	0,081	0,702
dPAM	0,230	0,328
dListrik	0,075	0,928
dToilet	0,949	0,580
dSampah	0,902	0,285
dIrigasi	0,983	0,651
dPetani	0,799	0,390
dJampersal	0,562	0,519
dJamKesMas	0,522	0,620
dJKN	0,269	0,611
dRaskin	0,334	0,314
dPKH	0,038	0,170
dKPS	0,000	0,171
dKIS	0,003	0,637
dKIP	0,015	0,651
dKKS	0,168	0,307

Sumber: IFLS 5 (Diolah 2018)

Tabel 8

Hotelling test setelah matching

Variabel	Nilai Rata-Rata Kelompok	
	Penerima Program	Bukan Penerima Program
Persentase Penduduk Miskin	20,56	23,21
Jumlah Populasi	13551	14188
Pendapatan Desa	2.0e+09	2.3e+09
Jarak_Desa/Kel.	18,95	17,36
Luas Wilayah	990,79	1749,7
Jawa	0,546	0,672
dAspal	0,082	0,339
dPAM	0,257	0,327
dListrik	97,577	95,864
dToilet	0,082	0,847
dSampah	0,608	0,615
dIrigasi	0,516	0,514
dPetani	0,731	0,718
dJampersal	0,701	0,667
dJamKesMas	0,721	0,758
dJKN	0,731	0,790
dRaskin	0,989	0,971
dPKH	0,350	0,480
dKPS	0,278	0,508
dKIS	0,092	0,237
dKIP	0,103	0,220
dKKS	0,061	0,112
<i>Hotelling p-value</i>	0,037	

Sumber: IFLS 5 (Diolah 2018)

Tabel 9 berikut memperlihatkan hasil analisis sensitifitas untuk penelitian dampak Program PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap kemiskinan menggunakan *Wilcoxon's signed rank test*. Angka perkiraan *Rosenbaum's bound* pada penelitian untuk *p-value* saat $\Gamma = 1$ cukup dekat dengan perkiraan analisis *propensity score matching*. Perkiraan dampak dari *NN matching* adalah -7,507 signifikan pada level 10% dan perkiraan *Hodges-Lehman point* adalah -4,408 signifikan pada level 5%.

Tabel 9

Analisis sensitifitas rosenbaum

R	p-value of Wilcoxon's Signed-rank Test		Hodges-Lehman Point Estimates	
	Upper Bound	Lower bound	Upper bound	Lower bound
1	0.0340	0.034064	- 4.4086	-4.4086
1.1	0.0134	0.074928	- 5.3114	-3.2720
1.2	0.0050	0.137362	- 6.1461	-2.5485
1.3	0.0018	0.219422	- 6.8517	-1.8128
1.4	0.0002	0.315347	- 7.5072	-1.0397
1.5	0.0002	0.417533	- 8.0689	-.40614

Sumber: IFLS 5 (Diolah 2018)

Tabel 9 juga menunjukkan bahwa pada setiap peningkatan yang kecil dari nilai $\Gamma=0,4$, *p-value* meningkat menjadi 0,315 pada batas bawah (lebih besar daripada 0,05). Pada penelitian ini, sebuah *hidden bias* atau bias seleksi pada ukuran $\Gamma=1,4$ cukup untuk menjelaskan perbedaan yang teramati pada persentase penduduk miskin antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Oleh karena itu, dua desa yang sama dan memiliki kovariat yang sama bisa berbeda peluang dalam mendapatkan intervensi sebesar 1,4 faktor. Angka 1,4 adalah nilai yang kecil, sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini sensitif terhadap *hidden bias* yang terdapat dalam estimasi. Setelah memperoleh kualitas *matching* yang memuaskan, maka selanjutnya dapat dilakukan estimasi *Average Treatment on the Treated* (ATET). Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan pada level 5% dengan menggunakan metode *matching NN with replacement* dan *Kernel Matching*. Hasil estimasi dampak adanya program PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap kemiskinan di Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10

Dampak PNPM mandiri perdesaan terhadap tingkat kemiskinan

Metode Matching	Dampak	S.E	T-stat
<i>NN with replacement</i>	-7,351	4.887	-1.50
<i>NN without replacement</i>	-1.832	3.439	-0.53
<i>Radius Kaliper</i>	-3.454	2.932	-1.18
<i>Kernel</i>	-7.352	4.886	-1.50

Sumber: IFLS 5 (Diolah), 2018

Berdasarkan hasil estimasi, Tabel 10 menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *NN with replacement*, terdapat dampak yang signifikan dari adanya Program PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap tingkat kemiskinan pada desa/kelurahan di Indonesia yang menerima program. Hal ini berarti bahwa, implementasi Program PNPM-Mandiri Perdesaan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,35%. Selain hasil estimasi dengan algoritma *NN with replacement*, hasil yang signifikan juga ditunjukkan oleh algoritma *Kernel* dengan nilai ATT sebesar -7,352. Hasil temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Hashemi dan Riley (1996) di Bangladesh, Afolabi (2008) di Nigeria, Oliveira (2000) di Brazil, Park dan Wang (2010) di Cina, Khan (2013) di Pakistan, Alese (2013) di Nigeria, dan Plaagerson dan Ulriksen (2015) di Afrika Selatan. Demikian juga dengan beberapa hasil penelitian atas program PNPM-Mandiri Perdesaan yang dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia, seperti Voss (2012), Diraka (2013), Akrojah (2013), dan Putri dan Prabawati (2014). Satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumelung (2015) menunjukkan hasil temuan yang sedikit berbeda. Kegagalan program di Desa Beong Kecamatan Sitaro, lebih disebabkan oleh *default* para pengelola program yang ada di desa tersebut, yakni menunggaknya penyetoran dana pada setiap bulannya dan tim pelaksana yang menyalahgunakan dana yang disetor oleh anggota. Bukan karena desain program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi dan buku panduan teknis pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan. Fakta empiris yang diperoleh dari penelitian ini, semakin menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat sangat efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di berbagai negara. Demikian juga dengan adanya Program PNPM-Mandiri Perdesaan di Indonesia yang telah mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, melalui implementasi program yang dilaksanakan secara tepat sasaran, sistematis, dan memiliki desain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosio-kultural masyarakat perdesaan di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan

Dengan mengacu pada tujuan penelitian dan hasil temuan yang telah diperoleh, setelah melalui serangkaian pembahasan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang ketat, maka diperoleh kesimpulan, yakni sebagai berikut.

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah perdesaan di Indonesia.
2. Desain program yang secara khusus mengedepankan unsur partisipasi masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 7,35 persen.

Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini terutama dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, ruang lingkup penelitian yang hanya terbatas pada 13 provinsi di Indonesia, belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pengaruh implementasi PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap tingkat kemiskinan pada seluruh desa/kelurahan di Indonesia.

Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti yang juga tertarik untuk meneliti topik serupa, agar kiranya dapat dilakukan pengembangan. Pengembangan yang dimaksud, diantaranya adalah dengan memperluas basis data responden pada desa/kelurahan lain yang terletak di luar lokasi penelitian.

Jika dilihat sekilas, provinsi-provinsi yang menjadi lokasi penelitian, masih lebih mencerminkan representasi dari kawasan barat Indonesia. Sementara itu, kawasan timur Indonesia seperti daerah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat belum memperoleh perhatian yang memadai. Sehingga dengan demikian, gambaran yang utuh tentang tingkat keberhasilan program dapat mencakup seluruh desa/kelurahan di Indonesia.

Belum adanya dasar hukum yang secara spesifik, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir PNPM-Mandiri Perdesaan pasca pelaksanaan program, menyebabkan dana tersebut menganggur (*idle money*) pada setiap rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di bank-bank milik pemerintah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun regulasi guna memberikan kepastian hukum tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana abadi PNPM-Mandiri perdesaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afolabi, M. Mujirayo. 2008. *Poverty Alleviation And National Development in Nigeria Through Women Empowerment*. Center for Gender and Social Policy Studies- Obafemi Awolowo University. ILE-IFE.
- Akrojah, Siti. 2013. *Evaluasi Dampak Kegiatan SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman (Pendekatan Metoda Propensity Score Matching)*. Tesis MEP FEB UGM. Yogyakarta.
- Alese, Oluwatoyin Dorcas. 2013. *Women and Poverty Alleviation Programmes in Nigeria: The Napep Approach*. Academic Journal Of Interdisciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy Vo. 2 No.4 E-ISSN 2281-4612. Departement of Arts Education, Adekunle Ajasin Akungba-Akoko, Ondo State. Nigeria.
- Angeles, Leonora C. 2004. *Grassroots Democracy and Community Empowerment: The Quest for Sustainable Poverty Reduction In Asia*. Article from The Social Justice Institute University of British Columbia. Canada.
- Caliendo, M. dan Kopeinig, S., 2008. *Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching*. *Journal of Economic Surveys*, Vol.22, No.1: 31–72.
- Chambers, R., (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. & (2013) *Ideas for development*. Routledge. London, Prentice Hall.
- Diraka, I Wayan Oka. 2013. *Evaluasi dampak program nasional Pemberdayaan masyarakat-Mandiri perdesaan (pnpm-mdp)(studi implementasi desa kerta,Kecamatan payangan,kabupaten gianyar)*. Jurnal. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Gurning, Herfita Rizki Hasanah. 2017. Tesis. *Evaluasi dampak program pemerintah Dalam pembangunan infrastruktur Terhadap kemiskinan di perdesaan*. Tesis abstrak. MEP FEB-UGM. Yogyakarta
- Hadi, Agus Purbatin. 2010, *Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Yayasan Agribisnis Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya. Jakarta.
- Hashemy, Syed M. & Anne P. Riley.1996. *Rural Credit Programs and Woman`s Empowerment In Bangladesh*. World Development Vol. 24 No.4 PP-635. Printed in Great Britain All Right Reserved. Pergamon.
- Harrison, Bennett. 1995. *A Decade of Federal Antipoverty Program Achievements, Failures, and Lesson*. Institute fo Research on Poverty. Academis Press Inc. New York San Fransisco. Londo.

- Khan, Sajid. 2013. *Women's empowerment through poverty alleviation: a socio-cultural and politico-economic assessment of conditions in pakistan*. International Journal of Academic Research and Reflection ISSN 2309-0405 (Online) ISSN 2308-8249 (Print) Vol. 1 No. 1 May 2013.
- Koentjaraningrat (2007.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. LPFEUI, Jakarta
- Munandar, Aris. *Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Vol 4 No1/208. Pascasarjana Universitas Nasional.
- Obidewu, Chukuruma & Abdullahi M. Yahie. 1996. *The Design and Management of Poverty Reduction Programs and Projects in Anglophone Africa*. Economic Development Institute of The World Bank. Washington D.C. USA.
- Park, Alber & Sangui Wang. 2010. *Community-Based Development and Poverty Alleviation: An Evaluation of China's Poor Village Investment Program*. Journal of Publik Economic Vol. 94 Issues 9-10 Pages 790-799.
- PNPM Support Facility (2014). *Keberlanjutan PNPM Wilayah Perdesaan*. Diakses tanggal 8 Juni 2014, dari <http://pnpm-support.org/id/berita/keberlanjutan-pnpm-wilayah-perdesaan>.
- Plagerson, Sophie & Marianne S. Ulriksen. 2015. *Cash Transfer Programmes, Poverty Reduction And Empowerment of Woman In South Africa*. Working Paper No.4/2015. Gender Equality and Diversity Branch Department. ILO. Jenewa.
- Putri, Dwita Noviananda & Indah Prabawati. 2014. *Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (studi tentang program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Dusun Wedani Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*. Ilmu Administrasi Negara, FISH UNESA. Semarang.
- Quadir, Fahimul & Jayant Lele. 2004. *Introduction: Globalization, Democracy and Civil Society, after the financial crisis of the 1990s*. York University Toronto & Queen's University Canada. Palgrave Macmillan. Canada.
- Rosenbaum, P.R. and Rubin, D.B. (1983), "The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects", *Biometrika*, 70, 1, 41-55.
- Saepudin, Tete & Acuviarta. 2016. *The Community Empowerment Program to Reduction Poverty in Banjar*. Trikonomika Volume 15, No. 1, June 2016, Page. 8-13 ISSN 1411-514X (print) / ISSN 2355-7737 (online). Fakultas Ekonomi Univ. Pasundan. Bandung.
- Serr, Klaus. 2001. *Thinking About Poverty*. The Federation Press ISBN 978 186287-6262. Leichhardt, NSW Sydney Australia.
- Siddik, Macfud. 2009. *Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004*. Kumpulan Artikel Kebijakan Fiskal. Kompas. Jakarta.
- Sianesi, B., 2001. *Implementing Propensity Score Matching Estimators with Stata*. UK Stata Users Group, VII Meeting. London: University of College London and Institute for Fiscal Studies.
- Strauss, J., F. Witoelar, dan B. Sikoki. 2016. *The Fifth Wave of the Indonesian Family Life Survey (IFLS5): Overview and Field Report*. WR-1143/1-NIA/NICHD.
- Sulistyaningrum, Eny. 2016. *Impact Evaluation Of The School Operation Assistance Program (BOS) Using The Matching Method*. Journal of Indonesian Economic and Business. Vol. 31 No.1/2016, 33-62.
- Sumelung, Rahayu M. 2015. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Artikel e-journal. Univ. Samratulangi. Manado.
- Todoaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2008. *Pembangunan Ekonomi Edisi ke 11*. Erlangga. Jakarta.

-
- UNDP, & Tarayana Foundation. 2008. *Poverty Alleviation and Empowerment of Rural Woman In Bhutan-South Asia*. <http://www.undp.org/contens/Bhutan/en/home/operation/> diakses tanggal 20 Oktober 2017.
- Voss, John, 2012. *Laporan Evaluasi Dampak PNPM Mandiri Perdesaan*. Bappenas & Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI. Jakarta.
- World Bank. 2016. *Impact Evalution in Practice Second Edition*. Washington DC.